

Catatan Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi dalam Nota Keuangan / RAPBN 2022: Perlindungan Sosial

Dradjad H. Wibowo

**Ekonom senior Indef,
Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN)**

Jakarta, 17 August 2021

Elastisitas produksi kesehatan dan PPKM

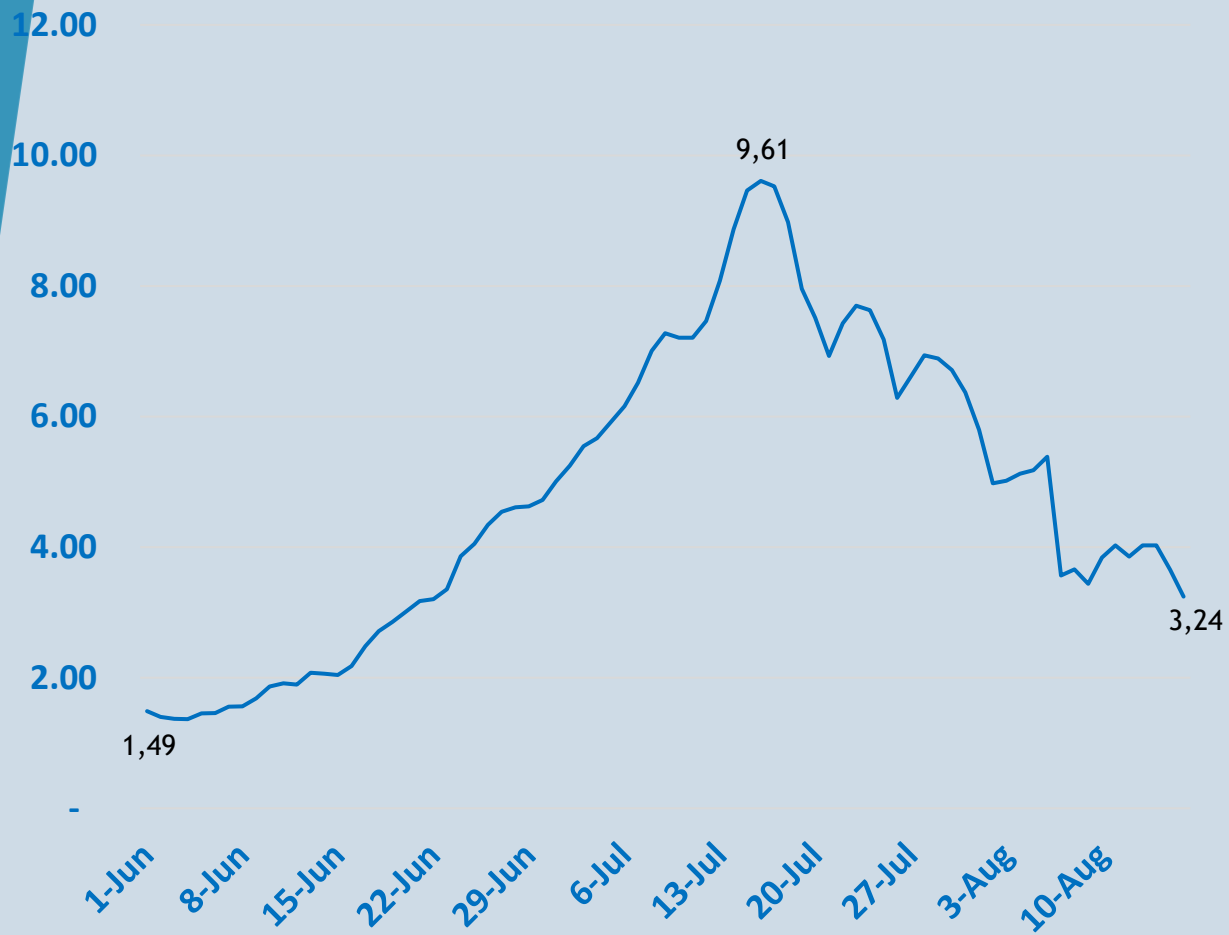
1. Dari sisi kesehatan public dan ekonomi kesehatan, elastisitas produksi kesehatan (ϵ_t) dapat dipakai sebagai salah satu kriteria untuk mengetahui apakah pembatasan sosial seperti PPKM bisa dilonggarkan. Pelonggaran bisa dipertimbangkan jika $0 \leq \epsilon_t \leq 1$ dan risiko re-eskalasi kasus rendah. Jika $\epsilon_t > 1$, pelonggaran tidak direkomendasikan.

2. Referensinya adalah:

Wibowo, D.H. When can physical distancing be relaxed? A health production function approach for COVID-19 control policy. *BMC Public Health* 21, 1037 (2021), DOI

<https://doi.org/10.1186/s12889-021-11088-x>.

Elastisitas Produksi Kesehatan Kasus Harian COVID-19 di Indonesia (1 Juni 2021 - 16 Agustus 2021)



1 Juni 2021: elastisitas = 1,49
Puncaknya tanggal 16 Juli 2021
sebesar 9,61.
16 Agustus: 3,24

Perlindungan sosial dalam RAPBN 2022

Jumlah orang yang bergantung kepada penghasilan harian di Indonesia, baik pekerja formal dan informal, sangat lah besar.

“... Menurut BPS, jumlah orang bekerja pada bulan Agustus 2020 adalah 128.45 juta dari 138.22 juta angkatan kerja. Dari jumlah tersebut, 77.67 juta orang, atau 60.47% dari mereka yang bekerja, adalah pekerja informal berpenghasilan tidak tetap, baik dari pekerjaan pertanian maupun non-pertanian. Dari kelompok pekerja formal, sekitar 17.48 juta orang bekerja di sektor manufaktur, di mana sebagian besar dari mereka bekerja dengan upah harian ...”

Sumber: Wibowo, D.H. Rakatama, A. Irhamna, A.D.P, and Wibowo, M.R. (forthcoming) “The political economy of sustainable development in Indonesia”

Perlindungan sosial dalam RAPBN 2022

Pandemi dan PPKM sangat memukul ekonomi rumah tangga dari rakyat berpenghasilan harian. Untuk kasus sekarang, PPKM dengan berbagai bentuknya sudah berjalan 1,5 bulan sejak 3 Juli 2021.

→ Itu sebabnya, sebelum COVID-19 ini teratasi, dalam arti menjadi penyakit yang mudah diobati (seperti flu biasa) melalui:

(i) program vaksinasi yang menghasilkan *herd immunity*,
dan atau

(ii) ditemukan obat-obatan dan perawatan medis preventif
ataupun kuratif,

maka program Perlinsos amat sangat krusial. Dia harus berada dalam jantung program Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi.

Perlindungan sosial dalam RAPBN 2022

Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2022 halaman 4-17:

- (1) Perlinsos melalui belanja K/L pemerintah pusat: Program Keluarga Harapan bagi 10 juta KPM, sebesar Rp28.709,8 miliar; (2) Program Kartu Sembako bagi 18,8 juta KPM, sebesar Rp45.120,0 milyar; (3) Program Indonesia Pintar bagi 20,2 juta siswa, sebesar Rp11.113,8 miliar; (4) Program KIP Kuliah bagi 650,6 ribu mahasiswa, sebesar Rp9.662,6 miliar; dan (5) bantuan iuran PBI JKN bagi 96,8 juta jiwa, sebesar Rp46.464,0 miliar.**
- (2) Perlinsos melalui belanja non-K/L pemerintah pusat: (1) Subsidi listrik kepada 37,9 juta pelanggan, sebesar Rp56.479,9 miliar; (2) Subsidi LPG tabung 3 Kg dengan volume 8,0 juta Metrik Ton, sebesar Rp66.254,5 miliar; (3) Program Kartu Prakerja, sebesar Rp11.000,0 miliar; (4) penyaluran subsidi bunga KUR sebesar Rp23.100,0 miliar; dan (5) dukungan Pemerintah untuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai amanat UU Cipta Kerja. Selain melalui Belanja Pemerintah Pusat, dukungan anggaran perlindungan sosial melalui TKDD diberikan melalui pemberian bantuan langsung tunai (BLT) desa kepada 7,55 juta keluarga di pedesaan, sebesar Rp27.200,0 miliar.**

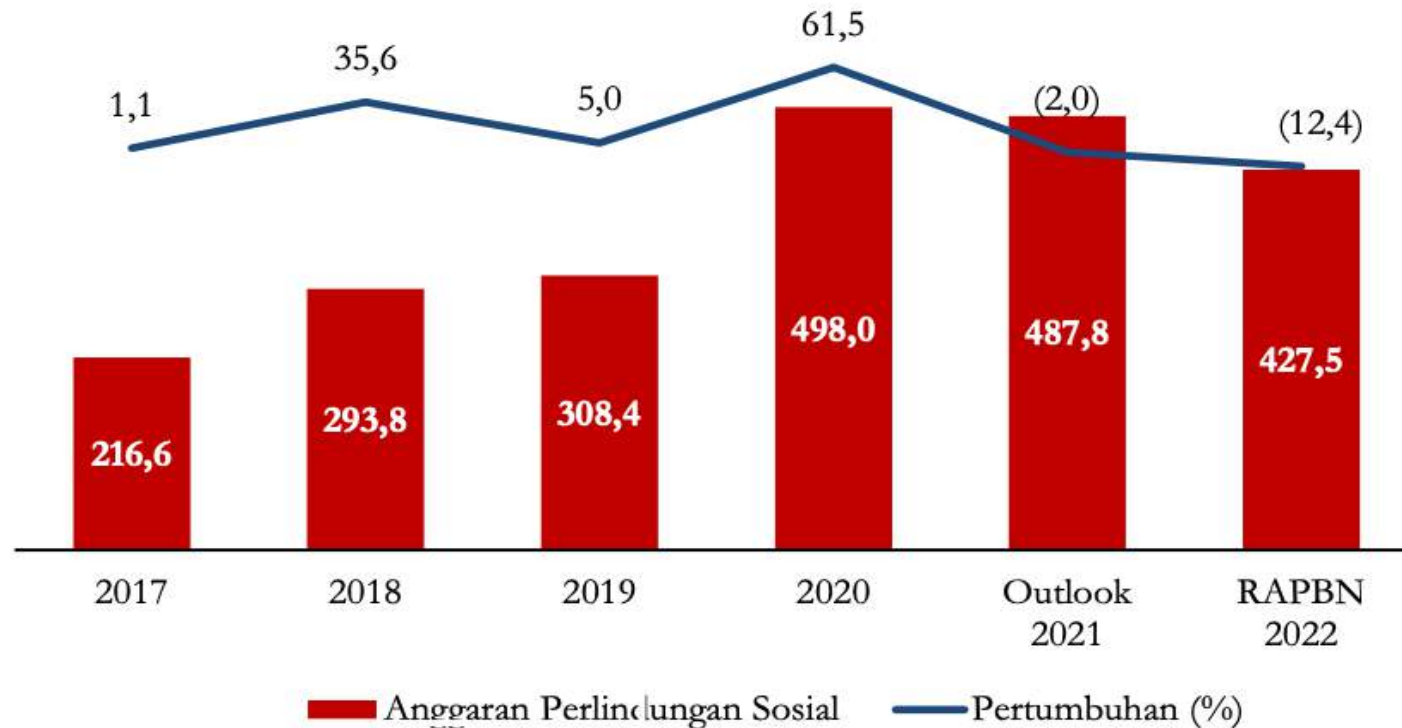
Perlindungan sosial: permasalahan

Perlinsos sangat rawan korupsi, atau minimal permasalahan tentang efektifitasnya. Hal ini perlu menjadi prioritas perhatian Presiden, DPR, BPK dan KPK. Beberapa di antaranya:

1. **Ketepatan penerima:** belum ada evaluasi yang kredibel dan akurat mengenai hal ini. Di sisi lain, masih terdapat masalah serius dengan data penerima Perlinsos.
2. **Ketepatan manfaat:** penerimanya benar yang berhak, tapi manfaatnya diambil pihak lain, seperti perusahaan pendamping / perantara. Contoh: kasus kemarahan Bupati Boltim terkait penyaluran bantuan UMKM.
3. **Korupsi**

Perlindungan sosial dalam RAPBN 2022

GRAFIK 4.2
ANGGARAN PERLINDUNGAN SOSIAL, 2017–2022
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Perlindungan sosial: belum saatnya diturunkan hingga Rp 60,3 triliun

Rencana pemerintah menurunkan dana Perlinsos hingga Rp 60,3 triliun hemat saya masih belum tepat waktu. Alasannya:

- 1. Belum ada data atau prediksi kredibel bahwa *herd immunity* akan tercapai tahun 2022:** Cakupan vaksinasi penuh di Indonesia per hari ini masih 10,4% (28 juta orang), di bawah rata-rata dunia 23,6%. Di sisi lain vaksin Sinovac yang paling banyak dipakai di Indonesia diragukan seberapa tinggi efektifitasnya.
- 2. Obat preventif dan kuratif masih perlu proses riset panjang.**

Riset vaksin dan obat agak tersendat. Yang saya lihat cukup maju adalah pengembangan vaksin oleh UNAIR.

Saya akan bahas tentang sains dan riset vaksin dan obat dalam kesempatan lain → harus di jantung juga.

Perlindungan sosial: belum saatnya diturunkan hingga Rp 60,3 triliun

3. Tidak ada data tentang porsi dan level antibodi COVID-19 di masyarakat. → **Sangat krusial bagi pemulihan pergerakan orang dan ekonomi → PERLU SURVEY ANTIBODI**

4. Bahkan seandainya ketiga kondisi di atas terpenuhi di tahun 2022, pelaku ekonomi selalu memerlukan waktu untuk pulih dari guncangan ekonomi (*economic shocks*).

Jangan lupa 62% dari program Perlinsos sudah ada sebelum pandemi. Yang murni sebagai respon terhadap pandemi adalah Rp 119-190 triliun.